Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan
e-ISSN: 2986-7266
Vol. 03 No. 01 (2025)

ISSN 2986-7266

Falsafah Kepemimpinan Jawa: Menggali Nilai Tradisional dalam Konteks Politik Modern

Rian Febri Maelan Saputro[1*], Masduk Asbari[2]
[1*,2]Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia
**Corresponding author: rianfebri.ms1402@gmail.com*

Abstrak – Kepemimpinan Jawa tidak selalu bersumber pada kekuatan fisik (kasekten), melainkan pada kualitas kepemimpinan universal yang bermutu. Sastra Jawa mencerminkan syarat-syarat kepemimpinan yang universal dan sering kali menjadi kendaraan politik untuk meneguhkan kekuasaan. Pemikiran tradisional Jawa berorientasi pada pusat kekuasaan dan menekankan ekspansi serta dominasi untuk mencapai perdamaian universal. Kepemimpinan Jawa cenderung anti-konflik dan menggunakan perintah halus, meskipun dalam konteks modern sering kali menyembunyikan kekuatan otoriter. Kisah-kisah wayang seperti Petruk Dadi Ratu dan tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong menggambarkan pembangkangan terhadap pemimpin yang tidak layak dan pentingnya kejujuran serta kesederhanaan. Budaya politik Indonesia, terutama pada masa Orde Baru dan era reformasi, dipengaruhi oleh tradisi bapakisme dan korupsi model Soeharto, yang merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Artikel ini juga membahas karya-karya R. Ng. Ranggawarsita yang memiliki elemen politik dan peran penting punakawan dalam menjalankan kehidupan. Kepemimpinan Jawa yang ideal digambarkan melalui tokoh-tokoh seperti Prabu Abiyasa dan Parikesit yang menyerahkan tahta dengan ikhlas dan selalu memikirkan nasib rakyat. Hubungan antara kehalusan dan kekuasaan sangat jelas dalam budaya Jawa, dan pemimpin yang menguasai Sastra Jendra akan memimpin dengan akal budi dan keadilan. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang falsafah kepemimpinan Jawa sepanjang zaman, dengan menggunakan pendekatan antropologi sastra, budaya, dan politik.

Kata kunci: Hubungan luar negeri, Ideologi Jawa, Integritas teritorial, Kedaulatan, Kekuasaan, Keselarasan, Kreativitas, Makrokosmos dan mikrokosmos, Mancapat dan mancalima, Politik sastra, Rajah Kalacakra, Sastra Jawa, Sastra politik

Abstract - Javanese leadership does not always originate from physical strength (kasekten), but rather from universal leadership qualities. Javanese literature reflects universal leadership requirements and often becomes a political vehicle to establish power. Traditional Javanese thought is oriented towards the center of power and emphasizes expansion and domination to achieve universal peace. Javanese leadership tends to be anti-conflict and uses subtle orders, although in the modern context it often conceals authoritarian powers. The stories of wayang such as Petruk Dadi Ratu and clown figures such as Semar, Gareng, Petruk, and Bagong illustrate defiance against unworthy leaders and the importance of honesty and simplicity. Indonesian political culture, especially during the New Order and reform era, was influenced by the tradition of fatherism and Soeharto-style corruption, which undermined people's trust in the government. This article also discusses the works of R. Ng. Ranggawarsita which has political elements and the important role of clowns in running their lives. Ideal Javanese leadership is depicted through figures such as Prabu Abiyasa and Parikesit who surrendered the throne sincerely and always thought about the fate of the people. The relationship between refinement and power is very clear in Javanese culture, and leaders who master the Jendra Literature will lead with reason and justice. This book provides in-depth insight into Javanese leadership philosophy throughout the ages, using literary, cultural and political anthropological approaches.

Keywords: Creativity, Foreign Relations , Harmony, Integrity, Javanese Ideology, Javanese Literature,

Macrocosm and Microcosm, Mancapat and Mancalima, Political Literature, Political Literature, Power, Rajah Kalachakra, Territorial Sovereignty.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Budaya dan tradisi Jawa memiliki pengaruh yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan Jawa dikenal dengan karakteristiknya yang unik, yang mencerminkan nilai-nilai kehalusan, anti-konflik, dan penggunaan perintah halus. Dalam konteks politik modern, karakteristik ini seringkali digunakan untuk menyembunyikan kekuatan otoriter. Pemikiran tradisional Jawa sangat berorientasi pada pusatnya, bukan pada batas wilayahnya. Konsep tapal batas terbatas memiliki arti yang sangat terbatas. Orang Jawa cenderung memandang dunia terbagi menjadi Jawa dan *sabrang* (seberang lautan). Meskipun konsep ini tidak diterima secara umum, banyak orang Jawa masih mempertahankannya. Konsep mandala dalam pemikiran politik Jawa menekankan pada ekspansi dan dominasi, dengan tujuan mencapai perdamaian universal. Pemimpin Jawa masa depan diharapkan memiliki sifat *asih, asah, asuh* (A3) untuk menjadi suri tauladan yang baik.

Pandangan tentang kebenaran dan sikap orang umumnya masih dipengaruhi oleh pola pemikiran dari masa lalu, terutama dalam karya sastra Jawa. Kepemimpinan Jawa cenderung anti-konflik dan menggunakan perintah halus. Namun, dalam konteks politik modern, perintah halus seringkali digunakan untuk menyembunyikan kekuatan otoriter. Teater politik dan permainan politik juga sering terjadi dalam dunia politik Jawa. Kelompok Ki Lurah Semar Badranaya terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka adalah punakawan yang jujur, sederhana, dan memiliki pengetahuan luas. Ki Lurah Semar disebut juga Begawan Ismaya atau Hyang Ismaya, dengan eksistensi yang misterius. Mereka bertugas mengemban/momong para kesatria sejati. Petruk Dadi Ratu adalah sebuah *lakon* yang menggambarkan pembangkangan terhadap pemimpin yang tidak layak. Petruk menjelma menjadi Prabu Kanthong Bolong dan mengubah tatanan kekuasaan yang kacau. Namun, akhirnya Petruk kembali menjadi dirinya sendiri setelah diingatkan oleh Semar.

Kepemimpinan Jawa sering menggunakan perintah halus dan *tapa brata*, namun sekarang mulai terpengaruh oleh politik dan kekuasaan. Ada resistensi terhadap *tapa ngrame*, dan pemilihan kepala desa menjadi semakin selektif. Banyak penduduk desa yang berpendidikan meninggalkan desa untuk mencari nafkah di sektor yang lebih menguntungkan. Falsafah kepemimpinan Jawa mengatakan bahwa pemimpin harus mengikuti tiga tingkatan, yaitu *nistha, madya, dan utama*. Pemimpin *nistha* cenderung korup, sementara pemimpin *madya* memberikan sebagian rejekinya kepada rakyat dan menghukum dengan adil. Pemimpin *utama* bersikap berbudibawa leksana dan memberikan sesuatu kepada rakyat secara ikhlas. Falsafah sumur dan sungai digunakan untuk menjelaskan cara orang Jawa menjalankan kepemimpinan, di mana sumur mewakili kepentingan pribadi dan sungai mewakili kepentingan orang lain. Politik sumur cenderung egois, sementara politik sungai lebih mengutamakan kepentingan orang banyak.

Pendapat ini menyatakan bahwa konsep kekuasaan Jawa tidak selalu harus bersumber pada kasekten, dan kekuasaan Jawa memiliki sifat kepemimpinan universal yang bermutu. Sastra Jawa juga mencerminkan syarat-syarat kepemimpinan yang universal. Politik dan sastra sering berkaitan, dan sastra politik mencerminkan pandangan politik dan pencarian kekuasaan. Sastra dan politik tidak akan pernah lepas, dan sastra sering disisipi permasalahan politik. Sastra sering menjadi kendaraan politik untuk meneguhkan kekuasaan. Hubungan antara kehalusan dan kekuasaan sangat jelas dalam budaya Jawa, di mana kehalusan merupakan tanda kekuasaan yang dicapai melalui pemusatan daya. *Pamrih*, atau motif pribadi yang tersembunyi, merupakan ancaman terbesar terhadap kekebalan dan kekuasaan seseorang. Pemimpin Jawa harus mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjalankan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu untuk memastikan keselamatan negara. Keturunan dan kedudukan juga mempengaruhi kepemimpinan, dan pemberantasan KKN membutuhkan ilmu rahasia untuk berhasil.

Falsafah hidup orang Jawa, seperti konsep *kajen* dan *suket teki*, mempengaruhi cara orang Jawa memandang kepemimpinan dan kebenaran hidup. Ada tiga jenis kebenaran dalam budaya Jawa: *etis, dogmatis, dan hakiki.* Kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan nilai-nilai universal. Model

kepemimpinan Jawa telah berubah seiring dengan perkembangan zaman, namun konsep-konsep Jawa masih berpengaruh dalam dinamika sosial politik Indonesia. *Suket teki* adalah lambang watak orang Jawa yang sulit dihilangkan, dan bisa menjadi negatif jika dipengaruhi oleh korupsi. Krisis kepemimpinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kehadiran *suket teki* dalam jagad kepemimpinan. Budaya politik di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru dan era reformasi, telah dipengaruhi oleh tradisi *bapakisme* dan korupsi model Soeharto. Budaya Jawa yang seharusnya menghormati atasan dan memberikan pengabdian, telah dipelintir menjadi budaya suap dan korupsi. Hal ini telah merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Perlu adanya restrukturisasi atau dekonstruksi budaya Jawa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Sipat kandel adalah warisan spiritual yang tidak semua orang bisa miliki, dan seringkali dilakukan ritual untuk memuliakannya. Ritual ini sering bersifat politik dan terkait dengan pertunjukan wayang. Pimpinan sering memanggil *nujum* untuk mendapatkan *sipat kandel*. Gaya kepemimpinan Jawa sering diibaratkan dengan kodok, yang bisa riang gembira namun juga bisa memberikan hukuman. Ada juga tekanan dari pemerintah untuk pemimpin lokal bergabung dengan proyek-proyek Orde Baru. Legitimasi penguasa sering dipadankan dengan tuntutan ketertiban yang berbeda-beda. Beberapa pemimpin bisa sombong dan tidak wajar dalam bertindak, sementara yang lain setia dan tunduk patuh. Teks tersebut membahas tentang zaman edan yang terjadi di Indonesia, di mana terdapat skenario sandiwara untuk memenangkan kepentingan tertentu. Zaman edan tidak hanya terjadi pada masa G-30-SPKI, tetapi juga pada era orde baru dan reformasi. Budaya politik yang terlalu condong pada kepentingan pejabat dan kekuasaan dapat menyebabkan zaman edan. Budaya Jawa yang mengutamakan kepuasan atasan juga menjadi faktor dalam zaman edan. Antropolog politik ditantang untuk melawan zaman edan dan memikirkan krisis budaya politik. Konsep kekuasaan dalam budaya Jawa juga berbeda dengan kekuasaan di Barat, di mana kekuasaan Jawa terkait dengan konsep kasekten dan kekuasaan homogen.

Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi konsep kepemimpinan Jawa, baik dari segi tradisi maupun penerapannya dalam dinamika sosial politik Indonesia saat ini. Pendahuluan ini akan menguraikan berbagai pandangan dan konsep kepemimpinan Jawa, serta relevansinya dalam konteks modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi (content analysis) dari buku "*Falsafah Kepemimpinan Jawa*." Metode ini digunakan untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam setiap bab buku tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks dari buku itu sendiri, yang kemudian dianalisis untuk menemukan tema-tema utama dan konsep yang disampaikan oleh penulis. Data dianalisis dengan cara membaca secara kritis dan mencatat poin-poin penting dari setiap bab. Selain itu, metode penelitian yang digunakan buku tersebut antara lain: (1) ***Pendekatan Kategoris-Histori:*** Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kategoris-historis untuk memahami kaitan antara budi dan kekuasaan dalam konteks kepemimpinan Jawa. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teks-teks sejarah dan sastra yang relevan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dianut oleh masyarakat Jawa pada masa lalu. (2) ***Studi Literatur:*** Melakukan studi literatur terhadap karya-karya sastra yang sejaman dengan KGPAA Mangkunagara IV untuk memperoleh tambahan konsep yang selaras dengan falsafah kepemimpinan 3A. Ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang falsafah kepemimpinan Jawa. (3) ***Analisis Isi***: Menggunakan analisis isi untuk meneliti bagaimana gagasan sosial dan politik dimasukkan ke dalam karya sastra. Teknik ini dapat membantu mengidentifikasi cara-cara pengarang menyampaikan kritik sosial dan politik melalui karya mereka, seperti yang dijelaskan oleh Williams. (4) ***Pendekatan Politik Sastra***: Menggunakan pendekatan politik sastra untuk menganalisis karya-karya yang berisi masalah politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami karya sastra dari sisi bentuk dan isi secara bersamaan, sehingga dapat mengungkapkan kegelisahan sosial-politik yang ada dalam karya tersebut. (5) ***Observasi dan Wawancara:*** Melakukan observasi dan wawancara dengan para pemimpin dan masyarakat Jawa untuk mendapatkan perspektif langsung tentang penerapan falsafah kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh kepemimpinan Jawa di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

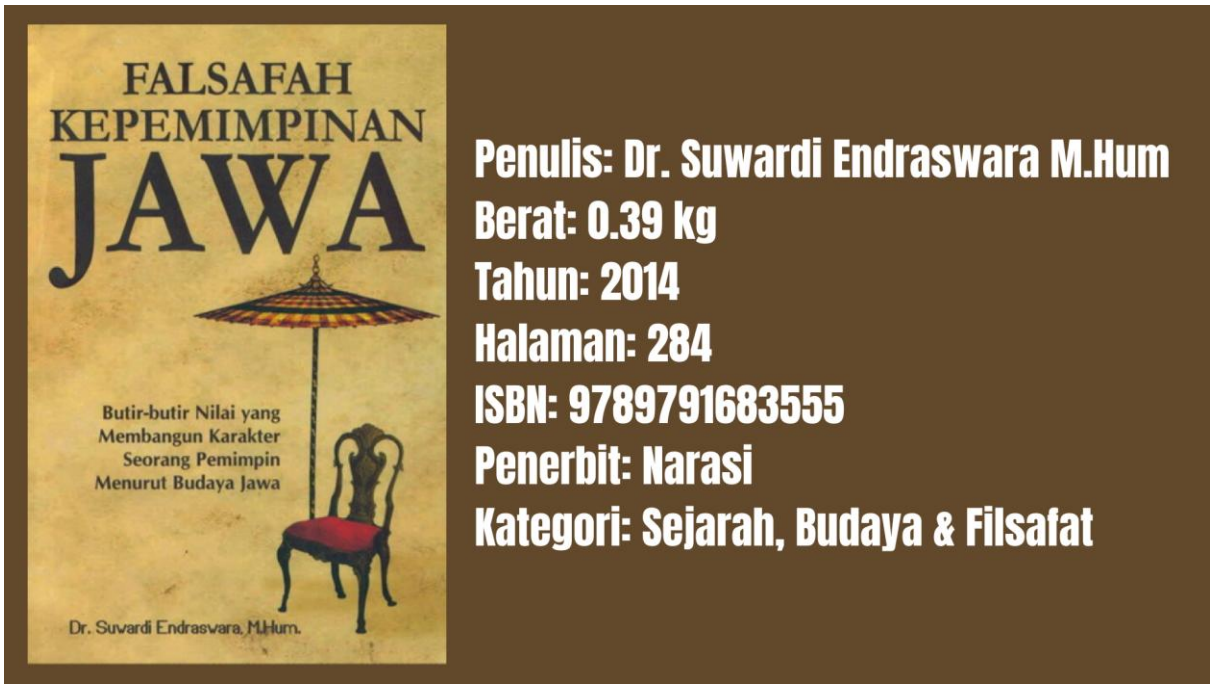

Gambar. Informasi Buku
Sumber: Belbuk.com (2014)

Hasil dari buku tersebut antara lain: (1) ***Falsafah Kepemimpinan Asah:*** Seorang pemimpin yang memegang falsafah asah memiliki tugas untuk mengayomi, mengatur, mendidik akhlak, dan memberi contoh perbuatan yang baik kepada bawahan. Teknik memberikan aturan adalah dengan berwasiat atau memberikan nasehat yang disampaikan dengan sentuhan rasa dan kemanusiaan, sering kali menggunakan estetika simbolik. (2) ***Pendekatan Kategoris-Historis:*** Penelitian ini menggunakan pendekatan kategoris-historis untuk memahami kaitan antara budi dan kekuasaan. Pendekatan ini berpegang pada tulisan-tulisan sejarah yang memberikan panduan sikap dan tindak-tanduk bagi para pejabat abdi dalem Raja. (3) ***Relevansi Falsafah Kepemimpinan Asuh:*** Falsafah kepemimpinan asuh yang menekankan sikap adil dan bimbingan kepada bawahan agar tidak meninggalkan jasa para leluhur masih relevan di zaman sekarang. Misalnya, dalam penegakan hukum yang adil dan pemerataan kesejahteraan melalui berbagai program pemerintah. (4) ***Kepemimpinan dan Politik dalam Sastra:*** Karya sastra sering kali memuat masalah politik, dan ini terlihat dalam berbagai pertunjukan seni tradisional yang berbasis musik gamelan. Syair-syair dan tabuhan dalam pertunjukan tersebut juga mengandung nuansa politik. (5) ***Kepemimpinan yang Menciptakan Kemakmuran dan Ketenteraman:*** Pemimpin yang ideal adalah yang mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, serta menenteramkan hati rakyat. Pemimpin yang membebani rakyat dengan hutang dan korupsi adalah cermin pemimpin yang tercela. Pemimpin yang taat pada janji dan sumpah, serta adil dalam memutuskan perkara, adalah contoh kepemimpinan yang benar-benar mengabdi pada rakyat. **Pembahasan** dari buku tersebut antara lain: (1) ***Implementasi Falsafah Asah dalam Kepemimpinan Modern:*** Falsafah asah yang menekankan pengayoman dan pendidikan akhlak dapat diterapkan dalam kepemimpinan modern dengan cara memberikan contoh yang baik dan menggunakan pendekatan yang humanis dalam memberikan arahan kepada bawahan. Ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dan etika kerja yang baik di kalangan bawahan. (2) ***Pentingnya Pendekatan Kategoris-Historis:*** Pendekatan kategoris-historis penting untuk memahami nilai-nilai kepemimpinan yang telah ada sejak zaman dahulu. Dengan memahami sejarah dan prinsip-prinsip yang dianut oleh para pemimpin masa lalu, kita dapat mengambil pelajaran yang relevan untuk diterapkan dalam konteks kepemimpinan saat ini. (3) ***Relevansi Falsafah Asuh dalam Penegakan Hukum dan Pemerataan Kesejahteraan:*** Falsafah asuh yang menekankan keadilan dan bimbingan dapat diterapkan dalam penegakan hukum yang adil dan program-program pemerataan kesejahteraan. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. (4) ***Peran Sastra dalam Menggambarkan Kepemimpinan dan Politik:*** Sastra memiliki peran penting dalam menggambarkan

kepemimpinan dan politik. Melalui karya sastra, pengarang dapat menyampaikan kritik sosial dan politik yang relevan dengan kondisi masyarakat. Ini terlihat dalam pertunjukan seni tradisional yang mengandung nuansa politik. (5) ***Kepemimpinan yang Menciptakan Kemakmuran dan Ketenteraman:*** Kepemimpinan yang ideal adalah yang mampu menciptakan kemakmuran dan ketenteraman bagi rakyat. Pemimpin yang taat pada janji dan sumpah, serta adil dalam memutuskan perkara, adalah contoh kepemimpinan yang benar-benar mengabdi pada rakyat. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan tenteram.

Kelebihan Buku

Buku ini memiliki kelebihan dalam pendekatannya yang multidisipliner, menggabungkan perspektif antropologi sastra, budaya, dan politik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang falsafah kepemimpinan Jawa. Dengan kedalaman analisis yang mencakup moralitas, idealisme, psikologi, dan simbolisme, buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Jawa membentuk karakter seorang pemimpin. Kisah-kisah inspiratif seperti Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu dan tokoh-tokoh seperti Petruk dan Gajah Mada memperkaya narasi dengan contoh konkret kepemimpinan bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, buku ini relevan dengan kondisi politik modern, mengaitkan nilai-nilai tradisional dengan isu-isu kontemporer seperti korupsi dan patronase, serta menawarkan kritik terhadap budaya politik saat ini. Dengan penekanan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri, buku ini tidak hanya relevan bagi mereka yang tertarik pada budaya Jawa, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif dan etis.

Kekurangan Buku

Meskipun buku ini menawarkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang falsafah kepemimpinan Jawa, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kecenderungan buku ini untuk terlalu fokus pada aspek-aspek tradisional dan mitologis, yang mungkin kurang relevan bagi pembaca yang mencari solusi praktis untuk tantangan kepemimpinan modern. Sebagai contoh, penulis sering kali merujuk pada cerita-cerita wayang dan mitologi seperti Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang meskipun kaya akan nilai-nilai filosofis, bisa terasa jauh dari realitas politik dan sosial kontemporer. Selain itu, penggunaan bahasa dan istilah-istilah yang kental dengan budaya Jawa bisa menjadi hambatan bagi pembaca yang tidak familiar dengan konteks tersebut, sehingga memerlukan penjelasan tambahan.

Buku ini juga cenderung mengidealisasi nilai-nilai kepemimpinan Jawa tanpa cukup mengkritisi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas dan dinamis. Meskipun buku ini memberikan kritik terhadap budaya politik kontemporer, solusi yang ditawarkan terkadang terasa kurang konkret dan lebih bersifat normatif, sehingga pembaca mungkin merasa kesulitan untuk mengimplementasikannya dalam praktik nyata. Terakhir, meskipun buku ini relevan dengan kondisi politik modern, kaitan antara nilai-nilai tradisional dan isu-isu kontemporer seperti korupsi dan patronase tidak selalu dijelaskan dengan jelas, meninggalkan pembaca dengan pertanyaan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam situasi nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi yang dilakukan dalam buku "*Falsafah Kepemimpinan Jawa*" karya Dr. Suwardi Endraswara M.Hum, dapat disimpulkan buku ini menunjukkan bahwa falsafah kepemimpinan Jawa memiliki nilai-nilai yang mendalam dan kompleks, yang mencakup moralitas, idealisme, psikologi, dan simbolisme. Kepemimpinan Jawa tidak hanya berfokus pada kekuasaan fisik atau kasekten, tetapi juga pada kekuatan batin dan nilai-nilai universal yang bermutu. Sastra Jawa memainkan peran penting dalam mencerminkan syarat-syarat universal seorang pemimpin dan sering kali berkaitan erat dengan politik. Konsep-konsep seperti astha brata dan ajaran Gajah Mada menekankan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Namun, budaya politik Jawa juga menghadapi tantangan seperti korupsi dan kolusi, yang telah merusak moral kepemimpinan. Oleh karena itu, restrukturisasi atau dekonstruksi budaya Jawa diperlukan untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan membangun kepemimpinan yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Bawono, H. (2003). *Petruk Nagih Janji*. Kaset 1-7, Koleksi Radio Pertanian Wonocolo (RPW/ dulu RKIP), Wonocolo-Surabaya.

Berg, C.C. (1974). *Penulisan Sejarah Jawa*. Jakarta: Djambatan.

Cederroth, Sven. (2001). *"Modernisasi Orde Baru dan Islam: Aparat Desa dan Tokoh Agama" dalam Kepemimpinan Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Eagleton, Terry. (2002). *Marxisme dan Kritik Sastra*. Terjemahan Roza Muliati. Yogyakarta: Sumbu.

Endraswara, Suwardi. (1988). *Falsafah Kepemimpinan Jawa Tradisional*. Surabaya: Jaya.

Poerbatjaraka, R.M.Ng. (1952). *Kapustakan Djawi*. Jakarta: Djambatan.

Ranggawarsita, R.Ng. (1997). *Serat Paramayoga*. Alih Aksara Kamajaya. Surakarta/Yogyakarta: Yayasan Mangadeg dan Centhini.

Ratna, Nyoman Kutha. (2005). *Sastra dan Culture Studies; Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ratna, Nyoman Kutha. (2011). *Antropologi Sastra; Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saminana, Made I Dkk. (2006). *Etika Politik dan Demokrasi*. Salatiga: Percik dan Ford Foundation.

Setiawan, Ahmad. (1996). *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stange, Paul. (1998). *Politik Perhatian; Rasa dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: LKIS.

Subroto, Raden Ayu H. Bangun. (1957). *Serat Tumuruning Wahyu Maja*. Djakarta: Penerbit Balai Pustaka.